

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berada di tengah hiruk-pikuk permasalahan sosial politik saat ini sungguh sangat memprihatinkan, kita seringkali disuguhkan dengan berita-berita yang menggambarkan betapa kejamnya dunia-dunia tersebut, tidak jarang kita melihat para perwakilan rakyat dan pemimpin rakyat melempar kata-kata kasar, berkelahi di saat sidang ataupun rapat dan adanya nilai tidak menghargai satu dengan yang lainnya, korupsi yang dilakukan aparat pemerintah dan wakil rakyat. Adanya perubahan nilai kehidupan dan fenomena-fenomena distorsi nilai kemanusiaan, kita melihat para remaja yang tawuran, narkoba, dan meningkatnya kriminalitas di jalanan, kurang empati (Djuwita; 2009, Madjid; 2000, Syarif; 1999). Selain itu kita sering melihat tayangan di televisi yang memberitakan ketidak kesejahteraan sosial, terlebih lagi masalah pendidikan, biasa kita dengar dan lihat berita bahwa ternyata masih banyak siswa tidak mendapat fasilitas yang memadai di sekolahnya ditambah lagi siswa dalam menempuh pendidikan begitu sulit bahkan mempertaruhkan nyawa hanya untuk menuntut ilmu, seharusnya dengan banyaknya tayangan-tayangan seperti itu dapat memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk mengatasi masalah tersebut tidak bisa jika hanya mengandalkan peran pemerintah, dan aparat dan instansi tertentu.

Diperlukan peran semua orang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, saling peduli dan saling tolong menolong satu sama lain adalah modal utama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai manusia yang hakikat kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam merealisasikan hakikat martabat kemanusiaan senantiasa memerlukan orang lain, di mana manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dijadikan berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, bersuku-suku serta berbangsa-bangsa tidak lain adalah untuk menjalani suatu hubungan yang harmonis, menjalin suatu hubungan kemanusiaan yang positif serta

untuk saling kenal-mengenal, dalam perjuangan untuk mencari kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur merupakan suatu tolak ukur kebaikan yang berkenan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia (Suwarma; 2016, Kaelan: 2013).

Pandangan hidup yang terdiri atas rangkaian-rangkaian nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan pribadi maupun interaksi manusia dalam masyarakat sekitarnya. Masyarakat secara tradisi harus merealisasikan antara Pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang diyakini kebenaran dan menjadi pegangan hidup anggotanya yang diwariskan secara turun temurun sebagai identitas jati diri bangsa yang mana akan memperkuat Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.

Namun sebagaimana yang kita ketahui manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat kehendak bebas dalam menentukan kehidupannya, dimana akan selalu mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan baik perubahan pola pikir, perubahan tingkah laku, serta sosial budaya. Perubahan-perubahan pada aspek tersebut tentunya beriringan dengan perkembangan zaman yang ada khususnya di era globalisasi sekarang ini.

Seperti yang kita ketahui perkembangan di era globalisasi membawa dampak positif yang begitu banyak, namun kita juga tidak menampik adanya dampak negatif. Diantara dampak positif dalam perkembangan tersebut adalah dimudahkannya segala aspek manusia, dari segi transportasi, teknologi, komunikasi, informasi baik pada tataran individual maupun dalam masyarakat yang akan membawa ke pergaulan internasional sehingga membawa masyarakat menjadi masyarakat global. Hal tersebut menjadi semakin seringnya interaksi antar masyarakat global yang mana menghapus batas-batas geografis dalam arti interaksinya. Beriringan dengan hal tersebut, perubahan-perubahan akan terjadi di berbagai sektor seperti ekonomi,

politik, teknologi, dan kebudayaan-kebudayaan sebagai konsekuensi yang logis dari interaksi masyarakat dunia (Abbas, 2013: 1).

Kate Nash dalam (Winarno, 2011: 8) juga menjelaskan Gejala global sangat berimplikasi terhadap masalah kebangsaan, sebab globalisasi khususnya globalisasi budaya (cultural globalization) di samping menciptakan penyeragaman, juga kecenderungan untuk menciptakan situasi dimana suatu budaya yang mengglobal mendominasi budaya lokal dan menciptakan Pemahaman baru mengenai kebangsaan, pandangan hidup, apa yang harus dilakukan sebagai warga negara, bagaimana warga terlibat, dan banyak aspek lain dari kehidupan sosial. Selain itu proses globalisasi dapat memperlemah dan melongsorkan bentuk-bentuk identitas kultural suatu bangsa (kalidjernih, 2009; 41).

Menurut Hofstede (2005) dan Triandis (1997) bahwa *Individualisme* sebagai tatanan sosial yang dikarakteristikan oleh ikatan emosional antar individu yang longgar, sehingga menggambarkan adanya hubungan bahwa individu satu tidak tergantung dengan individu lainnya. Sikap individualisme sebagai dampak negatif dari globalisasi dan paham liberalisme yang merupakan satu paham yang menerangkan bahwa seseorang yang menekankan hak kemerdekaan pribadinya tanpa harus memperhatikan orang lain dan berhak menentukan kehidupannya sendiri. Dengan sikap egois, orang-orang tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya untuk dapat hidup bersosialisasi dengan dirinya. Sikap seperti inilah yang dapat memudarkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial (Samosir, 2014; 16).

Seperti yang diungkapkan Ahmad Sawawidi dalam (Winarno, 2011: 11) sikap individualisme yang memunculkan ketidakpedulian antar warga, adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dengan yang miskin, yang sehat dengan yang sakit dan berbagai kesenjangan sosial lainnya. Oleh sebab itu sangat diperlukan orang-orang yang berani untuk menjawab persoalan-persoalan sosial, karena peduli saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan sikap keberanian untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada sebagai bentuk implementasi dari rasa peduli sehingga nantinya akan menjadi tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial sudah seharusnya melekat pada setiap orang, kelompok orang dan organisasi serta lingkungan masyarakat, orang yang memiliki tanggung jawab sosial lebih mencerminkan kekhawatiran melebihi dirinya sendiri (Wray, Laura -Lake, 2010, hal; 4), lebih lanjut dikatakan Hadiwijaya bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial berdasarkan aturan nilai dan kebutuhan masyarakat (Subagyo, 2014 hal: 193). Terkait hal ini beberapa studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa orang yang merasa bertanggung jawab untuk masalah sosial tertentu (kesadaran sendiri untuk bertanggung-jawab) lebih memungkinkan untuk mengatasi masalah ini dibandingkan dengan mereka yang menganggap tanggung jawab adalah urusan orang lain (Scott & Serek, 2014; De Groot & Steg, 2009).

Namun mengikisnya rasa tanggung jawab sosial dalam masyarakat berbanding lurus dengan pudarnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, rasa cinta tanah air, serta berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai, norma, matrealistik dan apatisme.

Terkait dengan hal tersebut, menggambarkan bahwa pentingnya keterlibatan setiap warga negara adalah solusi dalam memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan warganegara (*civic engagement*) dimana merupakan suatu kondisi atau norma dimana warganegara secara individual ataupun kolektif berpartisipasi aktif di kehidupan bermasyarakat berdasarkan keterampilan, keahlian, pengetahuan, yang berkombinasi dengan nilai-nilai, motivasi dan komitmen untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik (Abdillah, 2015; Jacoby, 2009; Adler & Goggin, 2005; Ehrlich, 2000). Keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan organisasi semua memainkan peran penting dalam mempengaruhi setiap warga masyarakat untuk terlibat (Andolina, dkk. 2003; Metz & Youniss, 2003; Torney Purta 2002 ; Youniss et al, 2002).

FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dihadapkan dengan tantangan untuk mendefinisikan kembali peran, misi dan tanggung jawabnya sebagai salah satu penyumbang calon pendidik terbanyak di Kalimantan Selatan. FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) kini dituntut untuk berusaha menyeimbangkan antara akses dan kualitas pendidikan, serta antara *output* pendidikan dengan lingkungan, sosial maupun ekonomi, tanpa mengabaikan peran dunia usaha dan masyarakat sipil, peran perguruan tinggi tampaknya cukup penting karena melalui Tri Dharma-nya dapat menyumbang secara substansial pada upaya peningkatan kesadaran dalam menumbuhkan kembangkan keterlibatan mahasiswa melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan dalam menerapkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat, akan tetapi selama ini pengabdian masyarakat hanya bentuk program-program kerja dari himpunan mahasiswa jurusan dan tidak ada program terencana dari pihak fakultas..

Fakultas harus menyadari betapa pentingnya pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa seperti yang termuat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam PP No. 30 Tahun 1990 yang merupakan penjabaran UU No. 2 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa dalam lingkup lingkup perguruan tinggi tercermin adanya tiga kelompok yang mencakup misi dan fungsinya sebagai berikut; a) Pendidikan merupakan kegiatan penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni; b) Penelitian merupakan kegiatan pengembangan IPTEKS; c) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pengembangan dan penerapan IPTEKS (Al-Muchtar, 2001 hal.343). Secara sederhana berisikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Posisi dan peran Fakultas menjadi sangat penting keberadaannya untuk berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran tanggung jawab sosial mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung dalam program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan aspek tri darma perguruan tinggi. Tuntutan ini menjadi sangat penting mengingat pemerintah mempunyai keterbatasan dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Tri Dharma Perguruan Tinggi semestinya harus benar-benar disadari oleh setiap Universitas, Fakultas dan mahasiswa itu sendiri, bahwa sebenarnya hidup sebagai

seorang mahasiswa tidak hanya menjalankan rutinitas perkuliahan semata, melainkan ada tanggung jawab lain yang harus diemban oleh mahasiswa.

Pengabdian masyarakat merupakan tantangan bagi mahasiswa untuk terjun langsung melihat kondisi di lapangan dan mencari solusi agar masalah-masalah sosial yang ada dapat teratasi, tentu saja tidak dapat di pungkiri bagaimana tanggung jawab besar yang diemban mahasiswa untuk mewujudkan perubahan bangsa. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu merubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai kepentingan bersama. Segala kemampuan tersebut akan sangat bermanfaat bila dapat diaplikasikan langsung dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itulah mahasiswa juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat.

Namun berbagai macam persoalan mahasiswa yang Peneliti temui di lapangan saat observasi awal didapatkan bahwa, *Pertama*. Belum adanya matakuliah yang secara jelas melibatkan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat seperti KKN, *Kedua*. Adanya sikap apatis mahasiswa pada kegiatan-kegiatan sosial, dan rendahnya minat mahasiswa dalam mengikuti organisasi-organisasi di dalam maupun luar kampus, *Ketiga*, sikap individualisme yang semakin muncul dan adanya kesenjangan perangkatan mahasiswa-mahasiswa, permasalahan-permasalahan tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian seperti yang di ungkapkan dalam penelitian Anggraeni (2016) menemukan bahwa adanya ketidak seimbangan antara kemampuan akademik dan kemampuan partisipasi yang menjadikan rendahnya kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis dan menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, Sebagian besar mahasiswa lebih tertarik untuk memperkaya bidang akademiknya dan sisanya memperkaya bidang sosial masyarakat meskipun hanya sebatas dalam program-program pengabdian masyarakat yang diwajibkan oleh kampus, ditambah lagi dengan penelitian Yenni Suzana (2011) dan Suparlan Al Hakim (2012) menemukan bahwa keadaan masyarakat yang berada di era globalisasi sekarang ini rentan terkena kasus narkoba, pergaulan bebas, maraknya perkelahian antar pelajar ataupun mahasiswa.

Terkait penelitian tersebut menunjukkan begitu kompleksnya permasalahan yang ada di kalangan mahasiswa, sehingga gelar yang disematkan kepada mahasiswa sebagai *agent of change* diragukan. Mahasiswa sebagai *agent of change* berarti mahasiswa adalah agent perubahan yang dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan untuk membawa negara Indonesia ke arah yang lebih baik, menggantikan generasi yang telah ada dan melanjutkan tongkat estafet pembangunan dan perubahan. Untuk menjadi *agent of change*, tidak cukup mahasiswa hanya memupuk diri dengan ilmu spesifik saja. Perlu adanya *soft skill* lain yang harus dimiliki mahasiswa seperti kepemimpinan, kemampuan memposisikan diri, interaksi lintas generasi dan sensitivitas sosial yang tinggi.

Oleh sebab itu pendidikan sebagai wahana transformasi budaya, nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berperan menjadi salah satu poros utama untuk berjibaku dengan perubahan-perubahan sosial budaya salah satunya PKn (*civic education*). Pendidikan kewarganegaraan yang mana sebuah sarana tepat untuk memberikan gambaran secara langsung pada mahasiswa tentang hal-hal yang bersangkutan tentang kewarganegaraan, persoalan-persoalan sosial pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pluralisme yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreativitas. Pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional, kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan antara lain agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai, agar mahasiswa memiliki kepedulian, tanggung jawab dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal, agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi, agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi

dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik, agar mahasiswa mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara bijak (Wahab & Sapriya, 2011; Winataputra. U.S, 2012; Winarno, 2014).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu kajian yang erat dengan persoalan budaya, nilai dan pengetahuan menjadi komponen yang telah mengalami beberapa kali perubahan serta pengembangan di berbagai sisi, mulai dari perubahan metode dan konten materi dan sementara itu objek pengembangan atau sasaran pembentukan PKn adalah keseluruhan ranah sosio-psikologi peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang menyangkut hak dan kewajiban sebagai warga Negara (Budimansyah & Suryadi, 2008; hal 19).

Pendidikan Kewarganegaraan berlandaskan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional khususnya pada pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, pendidikan kewarganegaraan selain mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air juga bertugas mengembangkan warga negara muda menjadi warga Negara Indonesia yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan masyarakat, dan Negara (Wahab & Sapriya, 2011; Winataputra. U.S, 2012;).

Selanjutnya merujuk pada PP No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, pada penjelasannya dikatakan bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhineka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua tahu bahwa

pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus berakhlak mulia, toleran dan mandiri dan demokratis (Al Muchtar, 2001). Pendidikan ini membuat setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik (Budimansyah, 2010).

Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tercakup dalam pendidikan kewarganegaraan, meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh pendidikan kewarganegaraan, akan lebih baik lagi jika pendidikan ini di manfaatkan untuk pengembangan diri seluas-luasnya. Oleh sebab itu sudah seharusnya himpunan mahasiswa pendidikan kewarganegaraan memiliki kepedulian sosial dan solidaritas yang tinggi terhadap persoalan-persoalan di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagai seorang mahasiswa yang lebih banyak mendapat pengayaan secara teori yang seharusnya diaplikasikan di masyarakat, pada hakikatnya kepedulian sosial itu sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab sosial (Luhglatno, 2007, Suparman, 2013). Hal ini sesuai dengan tujuan PKn untuk menghasilkan warga negara yang mampu membudayakan lingkungannya serta mampu memecahkan masalahnya secara individual maupun masyarakat yang ada di sekitarnya (Wahab & Sapriya, 2011; hal 29).

Himpunan mahasiswa Pendidikan kewarganegaraan setidaknya mempunyai peran sebagai penggerak intelektual, gerakan moral, dan gerakan sosial, seperti yang diungkapkan Leni Anggraeni (2015): *Pertama*, sebagai gerakan intelektual menempatkan mahasiswa sebagai pemilik yang harus bergerak dengan kepehaman, mengkaji berbagai ilmu pengetahuan dengan penuh kesadaran dan kepentingannya dalam mengembangkan ilmu dalam kehidupan yang pada akhirnya mampu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan kompetensi masing-masing. *Kedua*, sebagai gerakan moral sudah semestinya mahasiswa pendidikan kewarganegaraan terlibat dalam aktivitas-aktivitas pembangunan moral masyarakat yang dipastikan merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah dan

masyarakat. sebagaimana yang kita ketahui bahwa standar moralitas masyarakat tengah mengalami degradasi sampai sedemikian rendahnya, karena itu mahasiswa pendidikan kewarganegaraan yang notabene seorang intelektual yang lebih banyak dalam pembelajaran tentang konsep moralitas seharusnya mampu merekonstruksi kembali definisi ini pada standar semestinya. *Ketiga*, sebagai gerakan sosial mahasiswa pendidikan kewarganegaraan memiliki peluang besar untuk ambil bagian dalam kehidupan sosial di masyarakat dan baik kaitannya dengan proses pengawasan (pengkritik, kebijakan jika dinilai tidak memihak kepada masyarakat) dimana mahasiswa sebagai *social control*.

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan Peneliti, kajian tentang tanggung jawab sosial masih sedikit jurnal penelitian di Indonesia, Setelah Peneliti mencari literatur dari berbagai sumber, Peneliti berpendapat bahwa penelitian yang bertemakan tanggung jawab sosial ini lebih banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan (*Cooperation Social Responsibility*) dan masih sedikit penelitian-penelitian tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pihak pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan. Dengan maksud untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, maka dalam penelitian ini Peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan menyeluruh permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.

Kajian Ini diharapkan dapat memperkuat pendidikan kewarganegaraan sebagai basis pendidikan karakter dalam ranah kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan. Penelitian ini nantinya berperan untuk membangunkan rasa tanggung jawab sosial seorang mahasiswa, dan mendorong pihak Fakultas untuk ikut serta mengembangkan tanggung jawab sosial mahasiswa melalui pengabdian masyarakat untuk menunjang pembangunan demokrasi di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat sentral sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis, yakni membina kecerdasan warga Negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga Negara (*civic*

responsibility) dan mendorong partisipasi warga Negara (*civic participation*). Tiga kompetensi warga Negara ini sejalan pula dengan tiga komponen pendidikan kewarganegaraan yang baik, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan warganegara (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) (Branson, 1998). Warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas, warga negara yang memiliki keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang partisipatif, sedangkan warga negara yang memiliki karakter akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab (Winarno, 2014; hal 19).

Oleh sebab pentingnya membina kecerdasan warganegara (*civic intelligence*), tanggung jawab warganegara (*civic responsibility*) dan partisipasi warganegara (*civic participation*) dalam mendukung demokratis. Oleh sebab itu penelitian ini didasarkan pada paradigma Peneliti sebagai berikut; *Pertama*. Pengembangan nilai tanggung jawab sosial melalui kegiatan bakti sosial “PPKn Berkarya” dapat memperkuat keterlibatan warganegara. *Kedua*. Pelaksanaan bakti sosial “PPKn Berkarya” memiliki tahapan-tahapan yang efektif untuk mengembangkan nilai tanggung jawab sosial dalam upaya memantapkan keerlibatan warganegara. *Ketiga*. Kegiatan bakti sosial “PPKn Berkarya” memiliki dampak dan manfaat dalam mengembangkan potensi keterlibatan warganegara dalam pembangunan masyarakat. maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Tesis “PENGEMBANGAN NILAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL MAHASISWA DALAM UPAYA MEMANTAPKAN KETERLIBATAN WARGANEGARA (Studi Kasus pada Program Bakti Sosial “PPKn Berkarya” di SDN Sungai Pinang Baru 2 tahun 2017 HIMA PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat).

B. Identifikasi Masalah

Penelitian yang akan dilakukan Peneliti muncul berdasarkan hasil observasi awal dan identifikasi Peneliti, sehingga ditemukan beberapa permasalahan di lapangan yang menurut Peneliti penting. Pertama, adanya sikap apatis dikalangan

mahasiswa PPKn terhadap permasalahan sosial lingkup lokal maupun nasional dan cenderung lebih fokus pada aktivitas akademik, hal ini bisa mengakibatkan kecenderungan melupakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Kedua, persiapan yang tidak matang sehingga pada prosesnya cenderung tergesa-gesa yang mengakibatkan tidak terlalu maksimalnya suatu kegiatan. Ketiga, peran pengurus himpunan yang dirasakan Peneliti kurang maksimal dalam mengajak mahasiswa PPKn lainnya untuk terlibat dalam setiap kegiatan sosial. Keempat, semakin besar dampak negatif dari globalisasi yang Peneliti rasakan sehingga memberikan efek negatif kepada mahasiswa PPKn yang memungkinkan menggerus nilai-nilai positif yang ada pada mahasiswa tersebut.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka fokus permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini mengenai bagaimana pengembangan nilai tanggung jawab mahasiswa dalam upaya memantapkan keterlibatan warganegara. Untuk mempermudah proses penelitian, Peneliti mengidentifikasi masalah dalam beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Mengapa kegiatan bakti sosial “PPKn Berkarya” dapat mengembangkan nilai tanggung jawab sosial dalam upaya memantapkan keterlibatan warganegara?
2. Mengapa pelaksanaan bakti sosial “PPKn Berkarya” memiliki tahapan-tahapan yang efektif untuk mengembangkan nilai tanggung jawab sosial dalam upaya memantapkan keterlibatan warganegara?
3. Mengapa Kegiatan bakti sosial “PPKn Berkarya” memiliki dampak dan manfaat dalam mengembangkan potensi keterlibatan warganegara dalam pembangunan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan mengkaji, memperkuat dan mengembangkan tanggung jawab sosial di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM dalam upaya meningkatkan *civic engagement* dikalangan mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi

konsep untuk diterapkan dan dikembangkan di pada setiap jurusan yang ada di FKIP ULM.

Berdasarkan tujuan umum di atas, Peneliti menyimpulkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji kegiatan bakti sosial “PPKn Berkarya” yang dapat mengembangkan nilai tanggung jawab sosial dalam upaya memantapkan keterlibatan warganegara.
2. Mengkaji proses pelaksanaan bakti sosial “PPKn Berkarya” yang memiliki tahapan-tahapan yang efektif untuk mengembangkan nilai tanggung jawab sosial dalam upaya memantapkan keterlibatan warganegara.
3. Mengkaji dampak dan manfaat dari program bakti sosial yang dilakukan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat sebagai pengembangan nilai tanggung jawab sosial dalam upaya memantapkan keterlibatan warganegara

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan maupun Fakultas yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan kekuatan perguruan tinggi dalam mencetak akademis yang mampu memberikan kontribusi riil dalam membangun, memberdayakan serta menjawab berbagai tantangan yang ada di masyarakat terutama terkait peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam mengembangkan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai sejumlah manfaat secara teoritis maupun praksis.

1. Manfaat/signifikansi dari segi teori

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan keilmuan terkait dengan; (1) Kerangka konseptual filosofis pembelajaran PKn dalam mengembangkan *civic engagement* berbasis nilai tanggung jawab sosial, (2) Menjadi sumbangan bagi akademis khususnya Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan untuk memperkaya pengetahuan dalam menghadapi isu-isu yang berkembang di bidang kesejahteraan sosial masyarakat dalam latar *civic engagement*.

2. Manfaat/Signifikansi dari Segi Kebijakan

- a. Menjadi salah satu bentuk alternatif model dalam pembelajaran pelayanan masyarakat dan mempromosikan *civic engagement*.
- b. Sebagai masukan bagi HIMA PPKn dan Program Studi PPKn dalam perannya mengembangkan tanggung jawab sosial mahasiswa.

3. Manfaat/signifikansi dari segi praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan dalam rangka meningkatkan upaya-upaya implementasi teori PKn di kehidupan akademik dan bermasyarakat.
- b. Bagi Peneliti: Sebagai bahan pengalaman, pengembangan keilmuan, dan masukan yang sangat berharga dengan pengkajian tanggung jawab sosial sebagai penguat peran dan posisi Pendidikan Kewarganegaraan.
- c. Bagi Masyarakat: Dapat memberikan Pemahaman kepada masyarakat luas bahwa Pkn bukan hanya sekedar mata pelajaran ataupun mata kuliah, namun sebagai komunitas keilmuan yang sangat peduli kepada kondisi sosial masyarakat.
- d. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penghubung antara pemerintah dan mahasiswa, yang diharapkan nantinya menjadi rekan dalam menjalankan misi sosial. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main namun ikut serta mendukung dalam kegiatan-kegiatan sosial mahasiswa.

4. Manfaat/ Signifikansi dari Segi Isu dan Aksi Sosial

- a. Sebagai alat untuk memberikan informasi mengenai pengalaman dan dampak pada pengabdian masyarakat untuk aksi sosial dalam mewujudkan *civic engagement* di kalangan mahasiswa pendidikan kewarganegaraan khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga melihat, merasakan, dan menghayati apakah

praktik-praktik *civic engagement* yang dilakukan para mahasiswa selama ini sudah efektif dan efisien.

- c. Sebagai referensi untuk mendukung pada aksi-aksi sosial dalam latar *civic engagement* dan memupuk tanggung jawab sosial pada setiap pelaksanaan perubahan sosial demi menuju kondisi yang lebih baik.

A. Srtuktur Organisasi Tesis

Tesis yang di kembangkan terdiri dari Bab I sampai BAB V, yakni bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga adalah metode penelitian.

Bab I berisi uraian tentang pendahuluan secara rinci akan mendeskripsikan latar belakang penelitian. Identifikasi dan perumusan masalah, fokus masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional dan struktur organisasi tesis. Pada bab II terlebih dahulu Peneliti akan mendeskripsikan tentang kajian-kajian dan teori-teori mengenai *Social Responsibility*, *Civic Engagement*, *Citizenship Education*, dan serta beberapa penelitian terdahulu sebagai pendukung serta penelitian ini.

Bab Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada bab ini terdiri atas uraian lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, instrument dan peran Peneliti, penentuan subjek penelitian dan sumber data dan analisis data.

Pada bab IV berisi gambaran dari hasil temuan penelitian selama di lapangan, baik dari hasil dari observasi, wawancara dengan para informan serta analisis dari dokumen yang berkaitan dengan kegiatan terkait tema penelitian. Hasil temuan akan dikaitkan dengan konsep-konsep teori yang telah dipaparkan pada Bab II. Selanjutnya Bab V berisi jawaban dari pertanyaan yang Peneliti ajukan pada Bab I dan rekomendasi dari Peneliti yang diharapkan agar menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak yang terkait.

Wardiani Hiliadi, 2017

*PENGEMBANGAN NILAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL MAHASISWA DALAM UPAYA MEMANTAPKAN
KETERLIBATAN WARGANEGARA*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu